

# **EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH STUDI KASUS KABUPATEN BERBASIS DAS DAN NON DAS**

*Evaluation of The Expansion of Regency in Central Kalimantan  
Province  
A Case Study in River Basin-Based, and Non River Basin-Based  
Regencies*

**Ahmad M. Saribi<sup>1</sup>, Achmad Djunaedi<sup>2</sup>, Suryanto<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD)  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

## **ABSTRACT**

This research was intended to evaluate whether or not the territorial expansion in Central Kalimantan Province is in line with the normative criteria and empirical criteria.

The research was conducted in river basin-based regencies (Kotawaringin Timur and Katingan regencies) and non river basin-based regencies (Gunung Mas and Pulang Pisau regencies). It used a descriptive-qualitative method and a deductive-comparative approach.

The results showed that of the new findings that are supportive are: that expansion gives significant to the regional development, regional potency management using environment management pattern; transportation access affect the service for the public; the criteria of regional potency, social-culture and population as the reference for the government regulation are ideal to be applied in Java, Bali, and Sumatera; the expansion of regency refers to the documents of development planning, the excellent commitment of the implementor, and public aspiration support; it needs a preliminary research on new regency expansion, it needs social organization to coordinate the people's

---

<sup>1</sup> BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah

<sup>2</sup> Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

aspiration and higher learning institute's involvement in formulating the academic draft.

The variable of substance shows that of the new findings that are supportive to the division of sub-district cluster for the new regencies, which entirely follow the river basin from the upper-stream to the down-stream, the consideration for grouping the territory of new regency into the same territorial unit, and the expansion that refers to the former area of administration of the assistant of regents, which exhibit the local characteristics of expansion of regency in Central Kalimantan.

**Keywords :** *Evaluation - Expansion of regency - River basin based and non river basin based*

## PENGANTAR

Kebijakan pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten/kota (*capacity building for local governance*) yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, sekaligus sebagai bentuk intervensi pemerintahan daerah/publik untuk mengarahkan dan mengatur perkembangan wilayah itu agar lebih baik pada masa depan. Kebijakan itu banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia sejalan dengan bergulirnya era otonomi daerah. Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri, hingga tahun 2003 tercatat daerah yang mengalami pemekaran sejumlah 324 kabupaten dan 86 kota di 10 propinsi di Indonesia.

Undang - Undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan delapan kabupaten baru di Propinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan, harapan dan tantangan harus dicapai dan dihadapi secara sungguh-sungguh, jangan sampai Kabupaten yang baru dibentuk itu, setelah berjalan beberapa waktu ternyata tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan, sehingga harus kembali ke keadaan semula, yaitu kecamatan dan pembantu bupati. Demikian pula halnya bagi kabupaten induk jangan sampai terabaikan untuk tetap dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya.

Sistem pemekaran wilayah di Propinsi Kalimantan Tengah mengambil konsep dasar berbasis daerah aliran sungai dan non

daerah aliran sungai (orientasi fisik geografis), pemekaran wilayah Kotawaringin Timur menjadi tiga kabupaten berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Mentaya (Kabupaten Kotawaringin Timur), DAS Katingan (Kabupaten Katingan), dan DAS Seruyan (Kabupaten Seruyan). Kabupaten Kapuas menjadi tiga kabupaten berdasarkan Non Daerah Aliran Sungai, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, hal yang perlu ditentukan dalam merumuskan evaluasi pemekaran wilayah yang berbasis DAS dan Non DAS adalah mengetahui sejauh mana proses pemekaran dan substansi pemekaran wilayah Kabupaten itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang dapat ditarik permasalahan ini adalah "apakah pemekaran wilayah kabupaten berbasis DAS dan Non DAS di Propinsi Kalimantan Tengah, bila dievaluasi, telah sesuai jika ditinjau dari kriteria normatif dan kriteria empiris". Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah; (a) mengevaluasi apakah pola pemekaran wilayah di Kalimantan Tengah sesuai dengan kriteria normatif dan kriteria empiris, (b) secara umum mengkaji konsep proses pemekaran dan kriteria empiris sebagai landasan teori, dan selanjutnya membandingkan (mengevaluasi) untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dan temuan baru yang menunjang antara kriteria yang diturunkan dari landasan teori dengan kondisi empiris yang digali dari lapangan.

Pemekaran menurut Yunus (1978) adalah suatu proses yang berjalan secara alami atau dapat pula berjalan secara artificial, dan campur tangan manusia turut mengatur arah perubahan keadaan itu dengan titik berat dari periode waktu yang satu ke periode waktu yang lain, yang dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial ekonomi, budaya dan politik yang sangat kompleks dari kehidupan wilayah dan mempunyai pengaruh negatif atau positif terhadap kehidupan penduduknya.

Rangkuman pendapat Devas dan Rakodi (1993), Sawicki (1992), dan Soetrisno (1995) adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan kebijakan, yaitu dasar pemikiran (kejelasan tujuan dan sasaran), acuan (dukungan peraturan), pelaku (komitmen para *stakeholders*) dan tahapan - tahapan (perumusan masalah, perumusan tujuan, proyeksi, penyusunan alternatif, test dan pemilihan alternatif serta implementasi).

Dalam kriteria pemekaran wilayah kabupaten, P4N (1997) menyatakan terdapat enam prinsip-prinsip pemekaran kabupaten, yaitu atas dasar pertimbangan administrasi pemerintahan, ekonomis,

politik, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan masa depan. P4N (1997) juga menyatakan bahwa terdapat empat syarat-syarat penentu pemekaran kabupaten baru, yaitu adanya sumberdaya wilayah, penduduk, ruang dan keseimbangan antara daerah.

P4N (1997) memperlihatkan empat model kriteria pemekaran wilayah kabupaten untuk menyusun *cluster-cluster* kecamatan berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) model pemekaran atas dasar kriteria kondisi fisik (ekologi), (2) model pemekaran atas dasar efesiensi rentang kendali pemerintahan, (3) model pemekaran atas dasar jumlah penduduk, dan (4) model pemekaran atas dasar aspirasi masyarakat.

## CARA PENELITIAN

Lokasi penelitian mengambil lingkup wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, dan Kabupaten Katingan yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan, dan kabupaten itu berbasis daerah aliran sungai (DAS). Kabupaten yang berbasis non daerah aliran sungai (Non DAS) melingkupi wilayah administrasi Kabupaten Gunung Mas yang meliputi 6 (enam) wilayah kecamatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi 6 (enam) wilayah kecamatan.

Metode penelitian berupa metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparasi. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara bahasan evaluasi proses pemekaran dan kriteria pemekaran (substansi/produk) sebagai landasan teori apakah terdapat kesesuaian dan temuan yang menunjang dengan kriteria kondisi empiris pemekaran wilayah kabupaten berbasis DAS dan Non DAS di Kalimantan Tengah, sehingga diperoleh kesimpulan, rekomendasi dan saran.

Data primer hanya hasil wawancara dengan *stakeholders* utama dan *stakeholders* pendukung yang meliputi 57 nara sumber, yaitu 27 orang di kabupaten yang berbasis DAS (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan) dan 30 orang di kabupaten berbasis non DAS (Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau) serta melakukan konfirmasi dengan pakar/para ahli, yaitu suatu proses pengumpulan informasi (konfirmasi) yang dilakukan kepada para ahli/pakar untuk menghasilkan suatu konsep berdasarkan eksplorasi dan pengalaman para ahli di lapangan ditinjau secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pemekaran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kondisi empiris yang memenuhi (sesuai) dan tidak memenuhi (tidak sesuai) kriteria normatif serta temuan - temuan yang saling menunjang kriteria normatif.

#### **Kondisi empiris memenuhi kriteria normatif**

##### **a. Aspek dasar pemikiran**

Aspek dasar pemikiran, yaitu tahapan dalam proses perencanaan pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah sesuai dengan kriteria normatif, yang meliputi percepatan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan serta percepat pengelolaan potensi daerah.

##### **b. Aspek acuan**

Aspek acuan yang memenuhi pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 meliputi kriteria kemampuan ekonomi, sosial politik, dan luas daerah.

Kriteria kemampuan ekonomi ini merupakan faktor pembatas dalam menentukan kemampuan daerah dalam hal keuangan, sehingga pembagian wilayah menjadi kabupaten baru tidak menemui kendala dalam hal sumber keuangan negara.

##### **c. Aspek tahapan**

Aspek tahapan-tahapan yang memenuhi kriteria meliputi perumusan masalah dan tujuan, penyusunan alternatif, test dan pemilihan alternatif, dan implementasi.

##### **d. Aspek pelaku**

Aspek pelaku meliputi partisipasi masyarakat, keterlibatan dan komitmen *stakeholders*. Aspek pelaku yang merupakan publik disini mencakup masyarakat wilayah pemekaran kabupaten itu dan pihak legislatif daerah (DPRD) yang mempunyai kewenangan luas untuk mengontrol kebijakan yang dilakukan eksekutif.

## **Kondisi empiris tidak memenuhi kriteria normatif**

### **a. Aspek dasar pemikiran**

Aspek dasar pemikiran, yaitu tahapan dalam proses perencanaan pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah, tidak sesuai dengan kriteria normatif, yaitu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten berbasis DAS kurang memberikan kemudahan baru terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan yang cepat dan lancar, dikarenakan belum dibangunnya infrastruktur jalan dan hanya mengandalkan transportasi sungai dengan keterbatasannya pada musim kemarau.

Berbeda dengan kabupaten berbasis Non DAS pusat pemerintahan berada dibagian hulu dan hilir, sehingga lebih lebih dekat dan menjangkau pelayanan kepada masyarakat, dikarenakan transportasi jalan dan sungai yang sudah terbentuk.

### **b. Aspek acuan**

Aspek acuan yang tidak memenuhi kriteria pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 meliputi kriteria potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, dan pertimbangan lain.

Dalam kriteria peraturan pemekaran wilayah kabupaten terdapat dua kriteria besar yang menjadi dasar pemekaran kabupaten, yaitu kriteria normatif dan kriteria fungsional. Kriteria normatif erat kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan kriteria fungsional berkaitan erat dengan kapasitas dan karakteristik sebuah wilayah administratif.

Secara administrasi formal, kriteria jumlah penduduk dan sarana prasarana penunjang (potensi daerah dan sosial budaya) tidak memenuhi syarat yang diatur oleh PP No. 129 tahun 2000, terkecuali kriteria-kriteria lainnya (kriteria kemampuan ekonomi, luas wilayah, dan sosial politik). Sementara idealnya kriteria PP itu layak diterapkan pada pemekaran kabupaten/kota dan Propinsi di Jawa, Bali dan Sumatera. Salah satu contoh adalah kriteria sub indikator per 10.000 penduduk, dan hal ini merupakan kriteria jumlah penduduk minimal per kecamatan pemekaran di Jawa dan Bali, berdasarkan kriteria normatif Kepmendagri nomor 4 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan.

### c. Aspek tahapan

Aspek tahapan-tahapan yang tidak memenuhi kriteria adalah proyeksi. Kabupaten DAS dan Non DAS tidak melaksanakan pengkajian atau studi oleh daerah yang bersangkutan mengenai rencana pemekaran, baik penelitian yang dilakukan secara normatif dan fungsional, sehingga belum dapat mengetahui ke depan proyeksi prospek kabupaten baru.

### Temuan kondisi empiris menunjang kriteria normatif

#### a. Pemekaran mempengaruhi perkembangan wilayah

Kebijakan pemekaran wilayah kabupaten mengindikasikan pengaruh yang *significant* terhadap perkembangan wilayah (*starting point*) sangat berharga dalam proses pembangunan wilayah, terutama dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru.

#### b. Pengelolaan potensi daerah dengan pola manajemen lingkungan

Kebijakan pemekaran mempengaruhi pola manajemen pengelolaan dan potensi daerah, yaitu kabupaten DAS dengan berbasis lingkungan dan kabupaten Non DAS perlunya koordinasi yang mantap dengan fasilitasi pemerintah propinsi dan pusat.

#### c. Akses transportasi mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat

Akses transportasi darat dan sungai menuju ibukota kabupaten sangat menentukan peningkatan pelayanan masyarakat terutama berhubungan dengan arus informasi, materi dan tenaga serta keputusan lainnya. Di samping transportasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, juga sebagai orientasi gerakan pemasaran yang menunjukkan aliran barang untuk penjualan atau pembelian pada suatu daerah.

#### d. Pola persebaran sumberdaya alam merata utk menunjang PAD kabupaten baru

Kriteria kemampuan ekonomi merupakan faktor pembatas dalam menentukan kemampuan daerah dalam hal keuangan, sehingga pembagian wilayah menjadi kabupaten baru tidak menemui kendala dalam hal sumber keuangan negara dan potensi sumber daya alam, karena baik kabupaten DAS dan Non DAS memenuhi kriteria dikarenakan pola persebaran sumberdaya alam yang cukup merata sehingga menunjang pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.

**e. Kriteria acuan peraturan pemerintah ideal diterapkan untuk daerah Jawa, Bali dan Sumatera**

Kriteria potensi daerah, sosial budaya, dan jumlah penduduk ideal yang digunakan untuk daerah Jawa, Bali dan Sumatera, dikarenakan minimnya infrastruktur sarana dan prasarana serta jumlah penduduk, tidak memenuhi skor/bobot berdasarkan PP itu, sebagai contoh kriteria jumlah penduduk, berdasarkan Kepmendagri No. 4 tahun 2000, nilai pembagi per kecamatan minimal 10.000 jiwa.

**f. Pemekaran kabupaten mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan**

Kabupaten berbasis DAS draft akademik mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan, yaitu POLDAS dan PROPEDA, sedangkan pada kasus kabupaten berbasis Non DAS mengacu pada studi verifikasi produk unggulan Kabupaten Kapuas yang merupakan dasar pondasi penyusunan POLDAS dan PROPEDA Kabupaten Kapuas Tahun 2000 - 2004, memiliki hubungan saling dipertimbangkan secara langsung dalam penyusunan draft akademik final kabupaten berbasis Non DAS.

**g. Tingginya komitmen implementor dan dukungan aspirasi masyarakat**

Tingginya komitmen implementor, yaitu pemerintah pusat, DPRD - RI, pemerintah daerah kabupaten dan propinsi, DPRD Propinsi dan Kabupaten mendukung sepenuhnya pemekaran wilayah kabupaten baru. Hal ini didukung pula oleh aspirasi masyarakat terhadap pembagian *cluster* kecamatan berdasarkan wilayah eks pembantu bupati.

**h. Perlu disusun penelitian awal pemekaran kabupaten baru**

Pentingnya penelitian awal untuk pemekaran kabupaten baru didasarkan pada penelitian secara normatif dan fungsional terlebih dahulu (studi kelayakan) sebelum dilakukan proses politik, sehingga dapat diketahui ke depan prospek kabupaten baru dan induk. Penelitian ini biasanya melibatkan unsur perguruan tinggi lokal dengan menitikberatkan pada pembagian *cluster* kecamatan dan penentuan ibukota kabupaten baru.



**i. Dibentuknya organisasi masyarakat untuk mengkoordinasi aspirasi masyarakat**

Dibentuknya organisasi masyarakat bertujuan memberikan masukan dan tekanan berdasarkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan politik pemekaran kabupaten baru, terutama dalam pembagian *cluster* kecamatan.

**j. Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan draft akademik**

Pada pemekaran kabupaten berbasis Non DAS, keterlibatan perguruan tinggi sangat menunjang dalam penyusunan draft akademik, sehingga kualitas draft akademik lebih baik.

**Substansi (Produk)**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kondisi empiris yang memenuhi (sesuai) dan tidak memenuhi (tidak sesuai) kriteria empiris serta temuan-temuan yang saling menunjang kriteria empiris, antara lain sebagai berikut.

**Kondisi empiris memenuhi kriteria empiris**

**a. Aspek Fisik/ekologi**

Aspek fisik meliputi delineasi atas dasar bentang alam (DAS), rasio luas wilayah dan jumlah penduduk.

Pemekaran kabupaten berbasis DAS (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan) sesuai dan memenuhi kriteria fisik ini. Pembatas bentang alam (DAS Mentaya dan Katingan) merupakan faktor yang menentukan dalam membentuk *cluster-cluster* kecamatan, yaitu batas-batas administrasi kecamatan yang mengikuti alur DAS dari hulu sampai ke hilir.

**b. Aspek rentang kendali pemerintahan**

Aspek rentang kendali pemerintahan meliputi dukungan infrastruktur dan juga sumberdaya ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk yang berimbang.

Kriteria rentang kendali merupakan ukuran efektivitas dan efesiensi jalannya pemerintahan. Aspek yang terkait adalah luas wilayah yang terkait dengan jumlah kecamatan bawahan, jumlah penduduk, dan sarana penunjang melalui dukungan infrastruktur.

**c. Aspek aspirasi masyarakat**

Aspek aspirasi masyarakat meliputi pendapat tokoh masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya, untuk kriteria aspirasi sebagian besar telah terwadahi, terutama berkaitan dengan pembagian *cluster* kecamatan antara kabupaten induk dan kabupaten baru yang berbasis DAS dan Non DAS. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat melalui organisasi masyarakat dan pendapat tokoh masyarakat yang mengacu pada wilayah administrasi eks Pembantu Bupati.

**Kondisi empiris tidak memenuhi kriteria empiris****a. Aspek rentang kendali pemerintahan**

Aspek rentang kendali pemerintahan meliputi efesiensi rentang kendali. Struktur wilayah Non DAS lebih memberikan efesiensi kemudahan pelayanan rentang kendali pemerintahan dibandingkan dengan wilayah DAS.

Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan (berbasis DAS) hanya mengandalkan transportasi sungai untuk menghubungkan antara daerah hulu (utara), tengah dengan daerah hilir (selatan). Pada musim kemarau daerah hulu tidak dapat dilalui oleh transportasi sungai.

**b. Aspek jumlah penduduk**

Aspek jumlah penduduk yang meliputi kompleksitas masalah. Kabupaten DAS dan Non DAS tidak memenuhi karena minimnya jumlah penduduk dan penyebarannya tidak merata.

**c. Aspek aspirasi masyarakat**

Aspek aspirasi masyarakat yang meliputi potensi dan kesiapan aparat pemerintahan belum maksimal dan sangat kekurangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal dan menjadi faktor permasalahan yang mendasar.

**Temuan kondisi empiris menunjang kriteria empiris****a. Pembagian *cluster* kecamatan utuh mengikuti DAS**

Pembagian *cluster* kecamatan tidak hanya mengikuti punggung medan antara dua DAS, tetapi utuh secara keseluruhan dari hulu sampai ke hilir, sehingga menentukan pola pergerakan manusia, barang, dan informasi, serta pola manajemen lingkungan DAS yang berkelanjutan (*sustainable*).

**b. Pertimbangan membagi wilayah dalam satuan wilayah yang sama**

Pertimbangan membagi wilayah kabupaten yang sama, jumlah penduduk yang berimbang, dukungan infrastruktur dan juga sumberdaya ekonomi dalam satuan wilayah yang sama.

**c. Pemekaran mengacu pada eks wilayah administrasi pembantu bupati**

Adanya temuan baru terhadap pemekaran wilayah kabupaten, dengan orientasi pembagian *cluster* kecamatan atas dasar eks wilayah administrasi pembantu bupati, menunjukkan karakteristik lokal Kalimantan Tengah.

Temuan perbedaan baru pada kondisi empiris menggambarkan masukan baru bagi alternatif aspek pemekaran wilayah kabupaten. Perbedaan ini menunjukkan substansi pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah memperlihatkan karakteristik lokal tersendiri, dibandingkan dengan kondisi normatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Evaluasi pola pemekaran kondisi empiris di Kalimantan Tengah, baik yang berbasis DAS maupun Non DAS, ada yang memenuhi kriteria (sesuai), tidak memenuhi kriteria (tidak sesuai), dan temuan baru yang menunjang kriteria normatif dan kriteria empiris.

a. Proses pemekaran memenuhi kriteria percepatan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan serta percepatan pengelolaan potensi daerah (aspek dasar pemikiran), kriteria kemampuan ekonomi, sosial politik dan luas daerah (aspek acuan), penyusunan alternatif, test, pemilihan alternatif dan implementasi (aspek tahapan) serta partisipasi masyarakat, keterlibatan dan komitmen *stakeholders* (aspek pelaku).

Tidak memenuhi kriteria, yaitu belum efektif mempercepat pelayanan kepada masyarakat di kabupaten berbasis DAS dikarenakan hanya mengandalkan pada transportasi sungai dengan keterbatasannya (aspek dasar pemikiran), kriteria potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, dan pertimbangan lain (aspek acuan) serta proyeksi, tidak dilaksanakan penelitian awal pemekaran wilayah kabupaten baru secara normatif dan fungsional (aspek tahapan).

Temuan baru yang menunjang adalah pemekaran mempengaruhi *significant* perkembangan wilayah, pengelolaan potensi daerah dengan pola manajemen lingkungan, akses transportasi mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, pola persebaran SDA merata untuk menunjang PAD kabupaten baru, kriteria potensi daerah, sosial budaya, dan jumlah penduduk acuan peraturan pemerintah ideal untuk diterapkan di daerah Jawa, Bali dan Sumatera, pemekaran kabupaten mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan, tingginya komitmen implementor dan dukungan aspirasi masyarakat, perlu disusun penelitian awal pemekaran kabupaten baru, dibentuknya organisasi masyarakat untuk mengkoordinasi aspirasi masyarakat dan keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan draft akademik.

b. Substansi (produk) memenuhi kriteria pada delineasi atas dasar bentang alam (DAS), rasio luas wilayah dan jumlah penduduk (aspek fisik), dukungan infrastruktur dan sumberdaya ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk yang berimbang (aspek rentang kendali pemerintahan), pendapat tokoh masyarakat, dan pemerintahan (aspek aspirasi masyarakat).

Tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak efesiensinya rentang kendali pada kabupaten berbasis DAS dikarenakan hanya mengandalkan transportasi sungai (aspek rentang kendali pemerintahan), kompleksitas masalah disebabkan minimnya jumlah penduduk dan tidak merata penyebarannya (aspek jumlah penduduk) serta potensi dan kesiapan aparat pemerintahan yang belum maksimal dan sangat kekurangan (aspek aspirasi masyarakat).

Temuan baru yang menunjang adalah pembagian *cluster* kecamatan kabupaten baru utuh mengikuti DAS secara keseluruhan dari hulu sampai ke hilir, pertimbangan membagi wilayah kabupaten baru dalam satuan wilayah yang sama dan pemekaran mengacu pada eks wilayah administrasi pembantu bupati yang menunjukkan karakteristik lokal pemekaran wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah.

2. Kebijakan pemekaran kabupaten yang berbasis DAS (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan) memiliki hubungan yang erat dengan karakter wilayah, yaitu kondisi fisik pembatas bentang alam (DAS) dan rentang kendali pemerintahan, yang dalam membentuk *cluster-cluster* kecamatan mengikuti pola alur DAS dari hulu sampai ke hilir yang merupakan wilayah administrasi eks pembantu bupati.

3. Kebijakan pemekaran kabupaten yang berbasis Non DAS (Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau) tidak memiliki hubungan yang erat dengan karakter wilayah (DAS), tetapi cenderung kepada substansi rentang kendali pemerintahan dan kriteria aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan sumber kebijaksanaan yang dijabarkan dari kebijakan tertentu, seperti kependudukan, potensi sumberdaya alam, rentang kendali pemerintahan, dan pembangunan.

4. Pemekaran kabupaten berbasis DAS dan Non DAS secara normatif belum memenuhi syarat / kriteria sebagaimana diatur dalam PP No. 129 tahun 2000, terutama kriteria jumlah penduduk dan sarana prasarana penunjang yang belum memenuhi kriteria karena syarat PP hanya cocok diterapkan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Begitu pula dilihat dari aspek fungsional, empat kabupaten baru yang dibentuk belum memenuhi syarat. Hal ini terjadi karena kriteria fungsional belum menjadi dasar pertimbangan dalam implementasi kebijakan itu, di samping belum adanya penelitian yang mendukung, sehingga kapasitas kabupaten baru masih diragukan kemampuannya untuk bisa tumbuh dan berkembang pada masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang telah menugaskan, memberikan kesempatan, dukungan moral dan finansial sehingga penulis dapat menamatkan pendidikan di MPKD-UGM. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. Leksono Probo Subanu, MURP.,Ph.D dan Bapak Ir. Subaryono, M.A.,Ph.D selaku penguji yang telah memberikan masukan perbaikan tesis dan tulisan publikasi ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Devas, Nick and Rakodi, Caroline, eds. 1993. *Managing Fast Growing Cities : New Approaches to Urban Planning and Management in the Developing Word*, John wiley and Sons, Inc, New York.

- Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada, Tim Studi. 1997. *Penelitian Pengembangan/ Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Kutai*, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Propinsi Dati I Kalimantan Timur dengan P4N - UGM, Yogyakarta.
- Sawicki, David. S. 1992. *Analisis Kebijakan*, dalam Catanese, A.J dan Snyder, J.C. 1992. *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Karisius, Yogyakarta.
- Yunus, H.S., 1987, *Perkembangan Kota dan Faktor-Faktornya*, Makalah Seminar, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta